

**Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dokumen

RANCANGAN AKHIR (RANHIR)

RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun

2024



<https://bpbd.kepriprov.go.id>



Jalan Tugu Pahlawan No. 18 – Kelurahan Bukit Cermin – Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota
Tanjungpinang – Provinsi kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Renja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Ranhir Renja/ RKPD BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpinang, Juli 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DR. MUHAMMAD HASBI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660228 198602 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
BAB VI PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023	14
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau	24
Tabel 2.3.	Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	28
Tabel 2.4.	Usulan Program, Kegiatan Masyarakat Tahun 2024	34
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	40
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja	3
---	---

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, adapun tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
5. koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 362 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

BPBD melalui Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi 2 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 yaitu ‘Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata **‘Pelayanan’**, yang berarti bahwa pemerintah daerah melalui BPBD bertanggungjawab memberikan Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar tercipta rasa aman.

Rencana kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau memiliki keterkaitan dengan kebijakan Nasional khususnya dengan Renstra dan Renja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2020-2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat;
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 895);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rencana Tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar melakukan evaluasi kinerja tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2024.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; rekapitulasi program dan kegiatan; rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mengelola anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 16.231.184.408,00** dengan realisasi anggaran sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebesar **Rp. 15.116.165.395,17** atau sebesar **93,13 %**, dan realisasi fisik sebesar **97,50 %**.

Berikut Uraian Realisasi Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Tahun 2022:

a. Indeks Pencegahan Bencana;

Target Indikator Indeks Pencegahan Bencana Tahun 2022 yaitu 1,99 dengan Capaian 2,36 atau 118,59 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2022 untuk Indeks Pencegahan Bencana melebihi target di karenakan beberapa Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2021 belum dapat di hitung dan di Akumulasikan pada Tahun 2022.

b. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan;

Target Indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2022 yaitu 0,32 dengan Capaian 0,31 atau 96,88 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2022 untuk Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Belum memenuhi target di karenakan beberapa Dokumen Penanganan Pascabencana Tahun 2021 dan 2022 belum dapat disusun di sebabkan tidak dianggarkannya penyusunan Dokumen Penanganan Pascabencana.

c. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Target Indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2022 yaitu 0,46 dengan Capaian 0,27 atau 58,70 % dengan kategori Rendah, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2022

untuk Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Belum memenuhi target di karenakan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Serta Perda Penanggulangan Bencana Belum di tersedia, sehingga Dokumen Pendukung lainnya seperti Dokumen Rencana Kotijensi, Gladi Kesiapsiagaan, Aktivasi Sistem Komando, Pengendalian Operasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana belum dapat di laksanakan.

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang indikator capaiannya tidak terlaksana yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, hal ini di karenakan Penganggaran Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Di Usulkan pada APBD Perubahan Tahun 2022 yang di Sah kan Pada Tanggal 04 November Tahun 2022, sehingga rangkaian pelaksanaan Penyusunan Perda Tersebut tidak dapat di laksanakan dan telah di lakukan pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, untuk optimalisasi keluaran dan capaian Ranperda di Usulkan Kembali pada Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Daftar program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - Pengelolaan Risiko Bencana;
 - Penanganan Pascabencana Provinsi;
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Capaian Renstra secara umum dari awal Renstra Priode 2021 - 2026, dengan capaian pada seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai apa yg ditargetkan pada tahun 2022.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2024, perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja kedepannya.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Tahun s/d 2023 terlihat pada Tabel 2.1.

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja					Satuan					Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026					Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)					Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					Satuan					Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)																									
																														Target															Realisasi					Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian					Tingkat Capaian (%)										
1					2					3					3.a					4					5					6					7					8 = (7/6)					9					9.a					10 = (5+7+9)					11 = (10/4)										
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																																																																
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan urusan pemerintahan Provinsi					%					100					100					100					100					100					100					%					100					100									
1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dokumen					14					3					3					3					100					2					Dokumen					8					57,14									
1	05	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD					Dokumen					7					1																																												
											Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen					7					1					2					2					100					1					Dokumen					4					57,14									
1	05	01	1.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja					Dokumen					6					1																																												
											Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan					6					1					1					1					100					1					Laporan					3					50,00									
1	05	01	1.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja					Dokumen					5					0																																												

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	1	1	100	1	Laporan	2	40,00
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	6	1	1	1	100	1	Tahun	3	50,00
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	6	1							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	156	26	26	26	100	26	Orang/Bulan	78	50,00
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tujungan Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	6	1							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	1	1	1	100	1	Dokumen	3	50,00
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	12	0	0	0	0	3	Paket	3	25,00
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jenis	8	0	0	0	0				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	0	0	0	0	2	Paket	2	25,00
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	20	0	0	0	0	2	Orang	2	10,00
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	72	12	12	12	100	12	Bulan	36	50,00
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	72	12							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100	1	Paket	3	50,00
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	48	0	0	0	0				

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0	1	Paket	1	25,00
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	72	12							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100	1	Paket	3	50,00
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	72	12							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100	1	Paket	3	50,00
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/ Material	Bulan	48	0	0	0	0				
						Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0	1	Paket	1	25,00
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu pada Perangkat Daerah	Bulan	72	12							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	1	1	1	100	1	Laporan	3	50,00
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	72	12							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	1	1	100	1	Laporan	3	50,00
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	72	12	12	12	100	12	Bulan	36	50,00
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	72	12							
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Unit	12	2	2	2	100	2	Unit	6	50,00
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	6	1	1	1	100	1	Tahun	3	50,00

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	72	12							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	100	1	Laporan	3	50,00
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	72	12							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan danperlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	6	1	1	1	100	1	Laporan	3	50,00
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun	6	1							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan	6	1	1	1	100	1	Laporan	3	50,00
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	72	12	12	12	100	12	Bulan	36	50,00
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Telaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	72	12	12	12	100				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	132	2	2	2	100	22	Unit	66	50,00
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	60	12							
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	87	7	7	7	100	18	Unit	32	36,78
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Bulan	72	12							

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	2	2	2	100	2	Unit	6	50,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	3,44	1,28	1,99	2,36	118,59	2,66	Indeks	2,66	69,76
						Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,80	0,24	0,46	0,27	58,69	0,48	Indeks	0,48	43,75
						Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	Indeks	0,56	0,20	0,32	0,31	96,87	0,32	Indeks	0,32	57,14
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana	%	100	0	22,22	22,22	100	33,33	%	33,33	33,33
1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab/Kota	15	0							
						jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/ Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	560	0	60	60	100	200	Orang	260	46,42
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	5,45	25,45	25,45	100	45,45	%	45,45	45,45
1	05	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	0							
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalakan	Dokumen	1	0	2	1,5	75,00	0	1,5	1,5	150

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	03	1.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB	Kab/Kota	21	1	0	0	0				
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	150	30	0	0	0	30	Orang	60	40,00
1	05	03	1.02	0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pembangunan dan Fasilitas Gedung Pusdalops PB	Paket	4	0	0	0	0				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	4	0	0	0	0	1	Dokumen	1	25,00
1	05	03	1.02	0004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengadaan Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Jenis Peralatan	4	0	0	0	0				
						Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	80	0	0	0	0	20	Unit	50	25,00
1	05	03	1.02	0005	Pengelolaan Risiko Bencana	Tersusunnya Dokumen Indeks Kapasitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	5	0	1	1	100				
						Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	Dokumen	5	0	1	1	100	1	Dokumen	2	40,00
1	05	03	1.02	0007	Penanganan Pascabencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pemulihan Pasca Bencana, Terlaksananya	Dokumen	22	1	2	2	100				

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana										
						Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/ kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana (jitu pasna) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (r3p)	Dokumen	22	1	2	2	100	1	Dokumen	4	18,00
1	05	03	1.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB	Jenis Peralatan	6	0	2	2	100				
						Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Orang	120	0	20	20	100	20	Orang	40	33,00
1	05	03	1.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi Per Jenis Bencana	Dokumen	6	0	0	0	0				
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	6	0	0	0	0	1	Dokumen	1	16,00
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	6,45	22,58	22,58	100	41,94	%	41,94	41,94
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Waktu Tanggap Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten/ Kota	Waktu/ Jam	12	1 x 24	1 x 24	1 x 24	100				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	6	1	1	1	100	1	Laporan	3	50,00
1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah wilayah tersedia Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana BPBD Kab/ Kota	Kab/ Kota	38	5							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	990	150	150	150	100	240	Orang	540	54,54

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Satuan	Perkiraan Capaian Target Renstra s/d tahun 2023 (n-1)	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	9.a	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	03	1.03	0006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah wilayah Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Waktu/ Jam	1 x 24	0							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Laporan	4	0	0	0	0	1	Laporan	1	25,00
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	%	100	11,11	33,33	33,33	100	66,67	%	66,67	66,67
1	05	03	1.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	0	0	0	0				
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	1	Dokumen	1	100
1	05	03	1.04	0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Program Kerja Forum PRB, Jumlah Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana, Jumlah dokumen yang tersinkronisasi dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan stakeholder	Dokumen	8	1							
						Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	8	1	1	1	100	1	Dokumen	3	37,50
1	05	03	1.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab/ Kota	16	0	0	0	0				
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	4	0	0	0	0	1	Laporan	1	25,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 10 (sepuluh) dari Capaian Indikator Kinerja kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Priode 2021-2026 kemudian di tuangkan dalam Restra OPD, dari empat (4) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai dari tahun 2021 sampai 2022 secara keseluruhan Indikator Kinerja Program sudah dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota terdapat beberapa Sub-Urusan Bencana yang belum terlaksana, antara lain:

1. Pembuatan Rencana Kontijensi;

Pembuatan Dokumen Kontijensi Dapat di laksanakan jika Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sudah tersedia, Dokumen RPB di Susun Pada Tahun 2022.

2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Dapat di laksanakan jika Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sudah tersedia, Dokumen RPB di Susun Pada Tahun 2022.

3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dapat di laksanakan jika Dokumen Rencana Kontijensi (renkon) sudah tersedia.

4. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah *Zoonosis* Prioritas;
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah *Zoonosis* Prioritas dapat di laksanakan jika dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut terdapat wabah penyakit jenis hewan yang dapat menularkan penyakit kepada manusia, antara lain:

- a. Anthraks

- b. Cacingan, misalnya infeksi cacing gelang (*askariasis*) dan cacing pita (*taeniasis*)

- c. Demam berdarah
 - d. Malaria
 - e. Kaki gajah atau filariasis
 - f. Flu burung
 - g. Chikungunya
 - h. Pes
 - i. Infeksi bakteri *Salmonella* atau demam tifoid (tifus/tipes)
 - j. Toksoplasmosis
 - k. Rabies
 - l. Leptospirosis
 - m. Cacar monyet
 - n. Listeriosis
 - o. Ebola
 - p. Dermatofitosis, seperti tinea corporis, tinea capitis, atau tinea barbae
5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana;
6. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana dan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, dilaksanakan dengan menggabung sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana.

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, Rencana 100, Realisasi 100 (100 %) Sangat Tinggi, telah mencapai target.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian	Proyeksi		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunang Urusan Pemerintahan		Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Indeks Pencegahan Bencana	Permendagri 101 SPM Sub Urusan Bencana	Indeks	1,99	2,66	3,18	3,40	2,36	2,69	2,74	
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan			0,32	0,32	0,44	0,44	0,31	0,33	0,38	
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			0,46	0,48	0,57	0,76	0,27	0,32	0,37	

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
 - 2) Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Rencana penanggulangan Bencana (RPB) telah di susun namun Belum di legalisasi, Sehingga Dokumen terusnya seperti Dokumen Rencana Kontijensi, Gladi Kesiapsiagaan, dan lainnya belum dapat terlaksana;
 - 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - 6) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
 - 7) Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana;

- b. Tantangan dalam menurunkan Ancaman Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tantangan untuk mendorong dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
- 1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
 - 2) Terjadinya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
 - 3) Tingkat pemahaman masyarakat belum merata mengenai paradigma Penanggulangan Bencana;
 - 4) Pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki jangkauan yang sangat luas;
 - 5) Luas wilayah perairan yang lebih besar di bandingkan dengan daratan;
 - 6) Memiliki potensi bencana iklim yang sangat besar.
 - 7) Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berpotensi sangat tinggi yang disebabkan oleh Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi yang sangat dekat dengan Perbatasan-perbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia.
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
 - 2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
 - 3) Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
 - 4) Adanya dukungan Pemerintah Pusat;
 - 5) Adanya nilai gotong royong, kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian kinerja perlindungan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, terdapat perubahan dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD berubah menyesuaikan Pagu Anggaran, sehingga menghilangkan beberapa Sub Kegiatan serta Penambahan Sub Kegiatan Baru berdasarkan Permendagri 050-5889 Pemukhtahiran Sub Kegiatan Pada Program Penanggulangan Bencana.

Hilangnya Sub Kegiatan Berpengaruh terhadap pemenuhan SPM sub Urusan Bencana serta target Indikator RKPD BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Tabel. 2.3.
Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunang Urusan Pemerintahan	100 %	9.004.077.910	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunang Urusan Pemerintahan	100%	9.845.195.546
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	430.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	350.000.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.000.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	75.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	5.637.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	6.125.918.868
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	5.162.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	5.700.774.868
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	400.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	375.144.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	50.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket	138.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket	150.400.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	78.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	52 Paket	78.400.000
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang - Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang - Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	42.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.151.579.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	705.603.600
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.603.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.603.600
e	Penyediaan Bahan/ Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
f	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.976.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	840.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	150.000.000
a	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.137.098.310	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.918.273.078
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	27.720.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	27.720.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	130.000.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan	47.508.310	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan	47.508.310

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

		Riau	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	Riau	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	931.870.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.713.044.768
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	360.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	445.000.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	200.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	35.000.000
d	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000
e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Pencegahan Bencana	3,18	2.344.066.524	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Pencegahan Bencana	3,18	5.623.500.000
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	0,44				Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	0,44	
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57				Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana	55,56 %	486.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kepulauan Riau	Persentase Wilayah Dengan Potensi Tinggi Yang Terlayani Informasi Bencana	55,56 %	350.000.000
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	40 Orang	86.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna (Pulau Serasan)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	150 Orang	250.000.000
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	5 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalikan	1 Dokumen	100.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penanganan Pra Bencana	63,64 %	833.066.524	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penanganan Pra Bencana	63,64 %	3.048.500.000
a	-	-	-	-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	2 Dokumen	400.000.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

b	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	100.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga	Jumlah laporan yang memuat Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau Kawasan - kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	250.000.000
c	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	50.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	100.000.000
d	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	20 Orang	148.066.524	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	200.000.000
e	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25 Orang	95.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna (Pulau Serasan)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	80 Orang	300.000.000
f	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	2 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Bintan dan Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	6 Dokumen	600.000.000
g	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	2 Dokumen	130.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	-	-
h	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1 Laporan	25.000.000	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Lingga	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	25 Orang	75.000.000
i	Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	75.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani	2 Kegiatan	200.000.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

j	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	30 Unit	150.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh Peralatan perlindungan diri dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	135 Unit	923.500.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	61.29 %	465.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	61.29 %	1.000.000.000
a	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	20.000.000	-	-	-	-	-
b	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	150.000.000	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	250.000.000
c	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	50.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	100.000.000
d	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	165.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	500.000.000
e	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	30.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	100.000.000
f	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Laporan	50.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Laporan	50.000.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	77,78 %	560.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	77,78 %	1.225.000.000
a	-	-	-	-	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna (Pulau Serasan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	200.000.000
b	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	335.000.000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000
c	-	-	-	-	-	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	100.000.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

d	-	-	-	-	-	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	100.000.000
e	-	-	-	-	-	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : Lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga	100.000.000
f	-	-	-	-	-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	100.000.000
g	-	-	-	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	100.000.000
h	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	100.000.000
i	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	85.000.000
J	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	75.000.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	100.000.000
k	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi	1 Laporan	75.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota	90.000.000
TOTAL					11.348.144.434	TOTAL				15.468.695.546

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Tabel. 2.4.
Usulan Program, Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Pencegahan Bencana	3,18	
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,44	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	0,57	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana	55,56 %	
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Natuna	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	100 Orang	Surat Bupati Natuna
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penanganan Pra Bencana	63,64 %	
a	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Kab. Natuna dan Kab. Karimun	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	2 Dokumen	Surat Bupati Natuna dan BPBD Kab. Karimun
b	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Natuna, Kab. Kep. Anambas dan Kab. Lingga	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	Surat Bupati Natuna, BPBD Kab. Kep. Anambas dan Kab. Lingga
c	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	6 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
d	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kabupaten Natuna	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko	50 Orang	Surat Bupati Natuna

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

			bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana		
e	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Kep. Anambas dan Kab. Bintan	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	2 Dokumen	BPBD Kab. Kep. Anambas dan Kab. Bintan
f	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	661 Unit	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	61.29 %	
a	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tg. Pinang	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	77,78 %	
a	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Natuna	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	Surat Bupati Natuna

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan Nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Dengan Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan BNPB pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi BNPB 2020 – 2024 adalah :

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

Maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Menetapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Penetapan arah kebijakan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024 untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi sangat terkait dengan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah 2020 – 2024, sebagai gambaran umum berdasarkan pemasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka rancangan arah kebijakan 2020 – 2024 adalah:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.

6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan pada Rencana Strategis perangkat Daerah merupakan sebuah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri Yang Tanggap, Tangkas, Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan Bencana;
2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana;
3. Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel. 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran tahun 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,53	Penanggulangan Bencana		
1		Meningkatnya Kualitas Pencegahan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	3,18		Indeks Pencegahan Bencana	3,18
2		Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0,57		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0,57
3		Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	0,44		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	0,44

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2021 – 2026 dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024.

Pada Rانhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi kepulauan Riau tahun 2024 ini diusulkan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, Rانhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 15.468.695.546,- (lima belas milyar empat ratus enamt puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)** dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, Khusus Gaji ASN dan PPPK dibebankan kepada APBN/ Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, Berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra dan RPJMD Merupakan penjabaran dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Analisa kebutuhan sesuai dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah	Provinsi Kepulauan Riau	100 %	9.845.195.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 %	9.579.859.784
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	2 Dokumen	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	300.000.000
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	150.000.000
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	75.000.000
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	75.000.000
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1 Tahun	6.125.918.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Tahun	6.160.290.184
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	26 Orang/ Bulan	5.700.774.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	26 Orang/ Bulan	5.485.290.184
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	375.144.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	600.000.000
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	1 laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 laporan	75.000.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	3 Paket	150.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Paket	138.400.000
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Kepulauan Riau	52 Paket	78.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Paket	78.400.000
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Kepulauan Riau	5 Orang	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Orang	30.000.000
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	6 Orang	42.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Orang	30.000.000
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	12 Bulan	705.603.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	1.251.579.600
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket	85.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	70.000.000
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	15.000.000
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	120.000.000
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket	65.603.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	65.603.600
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	20.000.000
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	20.976.000
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	940.000.000
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	12 Bulan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	150.000.000
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	2 Unit	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit	150.000.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1 Tahun	1.918.273.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Tahun	1.219.590.000
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	27.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	27.720.000
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	130.000.000
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	47.508.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	30.000.000
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	1.713.044.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	1.031.870.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	12 Bulan	445.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	360.000.000
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Kepulauan Riau	22 Unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22 Unit	120.000.000
1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Provinsi Kepulauan Riau	20 Unit	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 Unit	30.000.000
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Kepulauan Riau	15 Unit	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15 Unit	30.000.000
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Unit	30.000.000
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Provinsi Kepulauan Riau	2 Unit	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit	150.000.000
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	3,18	5.623.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,40	1.302.838.551
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		0,57			0,76	
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan		0,44			0,44	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Wilayah Dengan Potensi Tinggi Yang Terlayani Informasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	55,56 %	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77,78 %	20.000.000
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna (Pulau Serasan)	150 Orang	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Orang	10.000.000
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	10.000.000
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	63,64 %	3.048.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81,82 %	440.838.551
1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Yang Dilegalkan	Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun	2 Dokumen	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Laporan Yang Memuat Kawasan Rawan Bencana (Per Jenis Ancaman Bencana) Dan/ Atau Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota Yang Memiliki Mekanisme Dan Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kawasan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Kawasan	10.838.551
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Dengan Proses Bisnis Dan Prosedur Tetap Yang Dilegalkan Dan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	20.000.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

		Mendapatkan Dukungan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Trc) Bencana	Jumlah Personil Trc Tingkat Provinsi Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Untuk Penanganan Awal Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	20 Orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 Orang	130.000.000
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Dan Aparatur Di Kawasan Risiko Bencana Tinggi Lintas Kabupaten/ Kota Yang Meningkatkan Kemampuan Dan Ketrampilannya Dalam Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna	80 Orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25 Orang	95.000.000
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah Dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Bintan	6 Dokumen	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	80.000.000
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Di Kawasan Risiko Bencana Tinggi Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terlibat Geladi Kesiapsiagaan Mengetahui Dan Memahami Mekanisme Dan Prosedur Tetap (SOP) Pengendalian Operasi Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Lingga	25 Orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Orang	20.000.000
1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani	Provinsi Kepulauan Riau	2 Kegiatan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Kegiatan	65.000.000
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Keluarga Yang Berada Di Kawasan Risiko Tinggi Bencana Lintas Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Peralatan Perlindungan Diri Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	135 Unit	923.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Unit	20.000.000
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	61.29 %	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80,65 %	370.000.000
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	145.000.000
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	10.000.000
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	300 Orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30 Orang	175.000.000

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	20.000.000
1.05.03.1.03.0006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	20.000.000
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Provinsi Kepulauan Riau	77,78 %	1.225.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88,89 %	472.000.000
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna (Pulau Serasan)	100 Keluarga	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	247.000.000
1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/ Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Kegiatan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Provinsi Kepulauan Riau	10 Lembaga	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Provinsi Kepulauan Riau	50 Orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Provinsi Kepulauan Riau	50 Orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	25.000.000
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	85.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	140.000.000
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	7 Kab./ Kota	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Kab./ Kota	60.000.000
			TOTAL		15.468.695.546	TOTAL		10.882.698.335

BAB V
PENUTUP

Rancanagan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder penanggulangan bencana dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan tangguh bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program/ kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat dan stakeholder Penanggulangan Bencana sangat diharapkan untuk menyukseskan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Juli 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660228 198602 1 006